

Jusuf Kalla, SBY (Harus) Bisa Berpisah

TAK ADA yang aneh kalau Wakil Presiden M Jusuf Kalla “berbalas pantun” dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Wajar belaka bahwa masing-masing menyatakan berperan dalam pemerintahan.

Keduanya akan berkompetisi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Mereka harus meyakinkan kepada publik tentang perannya dalam pemerintahan agar memperoleh dukungan. SBY tentu harus menegaskan bahwa semua kebijakan pemerintahan tak lepas dari arahan, keputusan, dan tanggung jawabnya sebagai presiden. Sistem pemerintahan presidensial memang demikian.

Masalahnya menjadi lain ketika wapres bukan orang separtai dengan presiden. Wapres Kalla bahkan memimpin partai yang lebih banyak menguasai kursi parlemen daripada partainya presiden, sehingga peran politik nyata Kalla tak cukup dijawab secara normatif dengan kedudukan dan peran presiden.

Kalla juga harus menyatakan bahwa dia adalah bempes atas berbagai kebijakan pemerintah yang tidak populer, misalnya ketika pemerintah dua kali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Bukankah wapres memang berperan sebagai “ban serep” yang bukan tanpa guna. Kalau presiden berhalangan sementara, misalnya, wapres memang harus berperan.

Kalau wapres harus “pasang badan” untuk kebijakan pemerintah, itulah cara memerintah yang dipilih SBY untuk mengedepankan Kalla. Apa boleh buat, wapres juga pembantu presiden. Kalau SBY tak perlu turun dari kursi presiden, Kalla tak perlu turun pula dari kursi wapres. Konstitusi tidak mengharuskan salah satu atau keduanya mundur dari jabatan, hanya karena masing-masing memutuskan menjagokan diri sebagai calon presiden (capres) menjelang berakhirnya masa jabatan kepresidenan 2004–2009.

Tradisi Baru

Namun, tradisi sistem presidensial (murni) memang tidak mengenal keadaan presiden dan wapresnya berpisah jalan, karena masing-masing menjagokan diri sebagai capres. Biasanya capres dan cawapres berasal dari partai yang sama setelah capres memenangi konvensi partai.

Pasangan tersebut mengandalkan popularitas dan mesin partainya dalam pemilihan langsung oleh rakyat. Indonesia mengadopsi sistem presidensial murni setelah amendemen UUD 1945, misalnya pengusulan capres dan cawapres dalam satu paket karena kepresidenan adalah single office dan pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Pilpres 2004 memulai tradisi baru tersebut, sehingga pasangan presiden-wapres bukan dipilih secara terpisah seperti bertahun-tahun dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sayangnya, atau mungkin untungnya, konstitusi mengharuskan pencalonan pasangan capres-cawapres oleh parpol (Pasal 6A [2] UUD 1945) meski keduanya harus mendaftarkan sendiri ke Komisi Pemilihan Umum.

Dalam konteks sistem multipartai tanpa satu parpol menguasai mayoritas parlemen, koalisi parpol bahkan dibutuhkan untuk mengamankan pemerintahan presidensial yang dibentuk. Sejak awal sudah terbuka kemungkinan presiden-wapres berpisah di tengah jalan seperti yang kini terjadi di antara SBY dan Kalla.

Pada awalnya pasangan SBY-Kalla memang bukan dicalonkan berdasarkan koalisi parpol yang dapat mengamankan pemerintahan. Pencalonan mereka diusung oleh Partai Demokrat, PKPI, dan PBB yang mengantongi kurang dari 20% suara Pemilu 2004. Waktu itu parpol pengusung capres-cawapres hanya disyaratkan memiliki dukungan 5% suara hasil pemilu.

Pasangan SBY-Kalla akhirnya keluar sebagai pemenang pada babak kedua Pilpres 2004. Bukan kebetulan bahwa Presiden SBY mendukung Wapres Kalla merebut jabatan ketua umum Partai Golkar (PG) di Bali pada 2005. Kendali Kalla atas PG menambah kekuatan koalisi. PG memperoleh 21% suara dalam Pemilu 2004. Pemerintahan semakin aman dengan topangan Koalisi Kerakyatan saat itu.

Bisa Berpisah

Dinamika dan gesekan hubungan Kalla-SBY dalam pemerintahan bukan tak terjadi, misalnya dalam pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) dan penggantian anggota kabinet. Namun, kepada banyak pihak di luar dan di dalam PG maupun dengan SBY, Kalla meyakinkan untuk tetap menjaga kekompakan pemerintahan sampai masa jabatan berakhir.

Kalla tidak menegaskan keinginannya untuk maju sendiri sebagai capres dalam Pilpres 2009, meski telah ditanya bahkan didesak oleh berbagai pihak. Kalla juga mengungkapkan, kalau menyatakan maju sebagai capres sebelum Pemilu 2009 dan ternyata perolehan PG hanya 2-5%, maka pemerintahan bisa terganggu, bahkan "habis" di DPR.

Tetapi setelah ungkapan ini "dipinjam" pihak Partai Demokrat, Kalla terdorong untuk berpisah dari SBY, bahkan menyatakan maju sebagai capres dan mengampanyekan diri menjelang Pemilu 2009. Akibatnya, pemilih disodori pembedaan antara Kalla/PG dan SBY/PD meski keduanya berpasangan dalam pemerintahan.

Hasil testing PG sebanyak 14,45% tak buruk-buruk amat, tapi jauh dari angan-angan untuk memperoleh 30% dalam Pemilu 2009. Turunnya perolehan PG di bawah Wapres Kalla sangat kontras dengan melambungnya perolehan PD di bawah Presiden SBY (dari 7,45% pada Pemilu 2004 menjadi 20,85% pada Pemilu 2009).

Singkat kata, dinamika politik se usai pemilu digerakkan lebih cepat oleh Kalla. Tetapi komunikasinya dengan SBY untuk bersama melanjutkan pemerintahan periode 2009-2014 tak segera bersambut. Setelah menengarai anasir pemecah-belah parpol, termasuk PG, dalam "utak-atik" pilihan koalisi menuju Pilpres 2009, Kalla bergairah membangun koalisi besar PG, PDIP, Hanura dan Gerindra (1/5/2009). Kalla (harus) bisa berpisah dari SBY.

Kalla bergerak lebih cepat lagi. Bayangan awal koalisi besar tersebut segera ditinggalkannya. Kalla/PG dan Wiranto/Partai Hanura memutuskan sebagai pasangan capres-cawapres yang pertama menantang incumbent SBY. Untuk pertama kali dalam sejarah Ketua Umum PG maju sebagai capres.

Untuk waktu yang lama hingga 1997, Ketua Dewan Pembina Soeharto (almarhum) selalu dicalonkan oleh Golkar dan ditetapkan sebagai presiden oleh MPR. Publik bisa menebak berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada Pilpres 2009. Lembaga survei mungkin sudah sibuk menghitung kemungkinan pilpres dalam satu atau dua babak, meski kepastian jumlah pasangan capres-cawapres menjadi faktor penting penghitungan tersebut.

Satu faktor yang sebaiknya tidak dibaca secara linier adalah menganggap dukungan parpol, atau koalisi parpol, akan berbanding lurus dengan dukungan kepada pasangan capres-cawapres dalam pemilihan langsung. (Sumber: *Seputar Indonesia*, 14/5//2009)